

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 1 (Satu)
 Provinsi : Kepulauan Riau
 Pimpinan Sidang 1 : Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP
 Pimpinan Sidang 2 : Ikhwan Hakim, ST, MSc, Ph.D
 Notulis Aplikasi : Hanifah Marsha Mudita
 Notulis Offline: Prawitasari Nur Lathifa
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau</i> 2. <i>BPPW Kepulauan Riau</i> 3. <i>Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau</i> 4. <i>Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau</i> 5. <i>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau</i> 6. <i>Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau</i> 7. <i>Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau</i> 8. <i>Dinas Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kementerian Pertanian</i> 2. <i>Kementerian Perhubungan</i> 3. <i>Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika</i> 4. <i>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi</i> 5. <i>Kementerian Sosial</i> 6. <i>Kementerian Kelautan Dan Perikanan</i> 7. <i>Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat</i> 8. <i>Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan</i> 2. <i>Direktorat Kelautan dan Perikanan</i> 3. <i>Direktorat Pangan dan Pertanian</i> 4. <i>Direktorat Perumahan dan Permukiman</i> 5. <i>Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat</i> 6. <i>Direktorat Regional II</i> 7. <i>Direktorat Transportasi</i>

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Pengembangan SPAM Regional Pulau Bintang	1		unit	Kab. Bintang	Kementerian PUPR	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Peningkatan SPAM Regional			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : - SPAM Regional tetap diusulkan - PKS Gubernur dengan Ditjen SDA sudah diusulkan, mohon penjelasan. - Sudah memenuhi tugas dan geotagging sudah diperbaiki.		Kementerian PUPR- DJCK : -		Dit. Perkim : - Masih direkomendasikan, mohon konfirmasi dari Bappeda Kepulauan Riau DJ CK PUPR, Balai BPPW, dan BPIW PUPR.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
2	Pendidikan dan Pelatihan vokasi berbasis Kerjasama Industri	200		Peserta Didik	Kota Batam	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		03 Transformasi Tata Kelola		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		02 Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Kerja sama		Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Provinsi Kepulauan Riau: -		Kementerian PUPR : -		Dit. APK : - Bisa menerima jika bukan pembangunan fisik, ada RO terkait dengan Dunia Usaha Dunia Industri berbasis Pendidikan Vokasi - Diakomodir dengan volume dan satuan menyesuaikan keuangan negara			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
3	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial	76		Lembaga	Provinsi Kepulauan Riau	Kementerian Sosial	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 Transformasi Sosial		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 Perlindungan Sosial yang Adaptif			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perlindungan Sosial	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial	Akreditasi Lembaga		Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : - Diminta untuk melakukan sosialisasi, lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan melalui panti. - Sebanyak 86 Tagging sudah di perbaiki. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau: - Belum dilakukan submit di eakreditasi.com sesuai arahan Rakortekrenbang.		Kementerian Sosial : - Tahun 2025 tidak ada penangan khusus		Dit. PKPM : - Diakomodir					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan	
4	Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	34		orang	Provinsi Kepulauan Riau	Kementerian Sosial	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 Transformasi Sosial		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 Perlindungan Sosial yang Adaptif		
		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		Program Perlindungan Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial			
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : -		Kementerian Sosial : - Usulan diarahkan ke makanan tapi di tahun 2025 tidak ada arah ke makanan. - Ditolak, karena anggaran 2025 tidak ada. RO ada tapi anggaran tidak ada		Dit. PKPM : - Diakomodir				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
5		14		km	Provinsi Kepulauan Riau	Kementerian PUPR	Ditolak dengan catatan	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pembangunan Jembatan Batam - Bintan	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		penyusunan DED di tahun 2025, yang dilakukan setelah <i>soil test</i> selesai di tahun 2024. Skema pendanaan harus diperhatikan penyelesaiannya. a.	
	02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
	Program	Kegiatan		KRO		RO		
	Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)		Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)		
	Catatan dan Tanggapan							
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan DED akan dilakukan di 2025, karena tahun 2024 masih ada pekerjaan <i>soil investigation</i> dari PUPR. - Aktivitas berlanjut ditahun 2025. - KPBU berproses di Bappenas dan PUPR terkait Pembiayaan, berharap ada kesinambungan untuk kegiatan fisik terkait jembatan. - Hibah lahan sudah dilakukan dari titik Batam-Titik Bintan. - Progres terakhir yang dibahas tentang kepastian pembiayaan, setelah <i>soil invest</i> diserahkan ke konsultan, agar proses pengerjaan Jembatan Babin tidak terputus. 		<p>Kementerian PUPR-BPIW :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ini masih dilakukan <i>soil investigation</i>, sebelumnya memang belum ada kajian tentang DED. - Ada 17 titik di sisi batam dan ... di sisi Bintan. - Harus sinkron, 2025 tidak dilakukan pembangunan fisik jika pembiaayaan belum clear, ada bagian jembatan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta, perlu diclear-kan terlebih dahulu. 		<p>Dit. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan sudah berprogres. - Terkait penyiapan skema pembiayaan. - Dari sisi skema didorong melalui skema KPBU, saat ini desainnya 30% dukungan pemerintah pusat, 70% dari KPBU badan usaha. - Direkomendasikan 70% pemerintah, 30% badan usaha. - Nmaun perlu kebijakan dari PUPR dan Kemenkeu, dimana KPBU didominasi pemerintah tidak boleh lebih besar dari badan usaha, masih dikaji oleh DJPI. - Kajian <i>Land Value Capture</i> terkait skema pembiayaan. 				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<ul style="list-style-type: none"> - Semoga masuk di RPJPN dan RPJMN agar ada kesinambungan. <p>Dinas PUPR – Provinsi Kepulauan Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan pembahasan dengan pemerintah pusat. - Pembagian kewenangan pusat, tugas pemda pembebasan lahan, dan masalah lahan sudah selesai. - Pembahasan dengan PU terkait <i>soil investigation</i> di 8 titik sudah dilakukan di Batam ke Tanjung Sauh. Dianggap kurang karena ada permintaan AIB, karena seluruh titik harus dilakukan <i>soil investigation</i>. - Pelaksanaan 17 titik selesai Oktober 2024, data diserahkan ke pemerintah provinsi dan PUPR untuk dilakukan penyempurnaan DED. - Proses 1 bulan, november sudah selesai desain DED. - Berharap skema pembiayaan sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. - Sehingga DED selesai di November 2024 dan dapat langsung dilakukan pembangunan fisik. 			<ul style="list-style-type: none"> - Keisapan: <i>soil test</i> akan diselesaikan PUPR 2024, pemerintah daerah sudah melakukan pembebasan lahan - Penyiapan dokumen maupun penyusunan DED akan dilakukan setelahnya. - Tahun 2025 tidak ada kegiatan fisik karena masih menunggu skema pembiayaan DJPI, DED menunggu Soil Test. 	
No	Usulan	Volume	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
6	Penggantian Jaringan Distribusi Utama (JDU) Perumda Air Minum Tirta Kepualuan Riau di Wilayah Kota Tanjungpinang serta Pengembangan Cakupan Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kepualuan Riau	899		SR	Kota Tanjung Pinang	Kementerian PUPR	<p>Diakomodir dengan catatan RO terpilih: Perluasan SPAM (Penggantian JDU); SR tidak diakomodir karena merupakan kewenangan daerah; Dit Perkim memprioritaskan Kepualuan Riau pada Trilateral Meeting, apabila RC dan APIP belum siap akan di drop digantikan usulan lain yang lebih siap.</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman			Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan RC berakitan review APIP sudah berproses. - Geotagging sudah diperbaiki. - Sudah ada namun diganti karena ada kebocoran dan pipa sudah masuk badan jalan dan permukiman, pengadaan sudah sejak tahun 1971. - RC terkait DED pergantian Pipa, daftar tunggu pelanggan selesai, surat lain sudah disiapkan, 		<p>Kementerian PUPR-DJCK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian JDU sudah sejak 1971 layak diperbaiki. - Kelengkapan RC apakah sudah siap tahun ini agar siap dilakukan tahun 2025? - SR kewenangan daerah, JDU kewenangan pusat memperhatikan RC semoga tahun ini selesai, maka 2025 akan dilaksanakan. - RO terpilih: perluasan SPAM (Penggantian JDU). - Setuju diakomodir. 		<p>Dit. Perkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pergantian JDU atau pembangunan baru? Jika belum terbangun apakah sudah ada komitmen pembiayaan? - Setuju diakomodir. 					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		review APIP sudah akan diselesaikan.							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
7	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Sebayar, Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur	1		Paket	Kab. Natuna	Kementerian PUPR	Diakomodir dengan catatan dari SDA: jaringan transmisi dan CK: IPA diakomodir tahun 2025 dan geotagging perlu dicek kembali.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : - RC sedang berproses terkait kelengkapan investasi. - Pada 2022 sudah dibangun Embung Sepadan dan sudah selesai, Embung Sebayar ini dimanfaatkan untuk pemenuhan air termasuk di ARHANUD.		Kementerian PUPR-DJSDA : - Pipa Transmisi masih akan dibangun tahun depan, jika dilakukan parallel sudah bisa. - Intake sudah ada, hanya pipa transmisi yang akan dilakukan tahun 2025.		Dit. Perkim : - Jika dari DED sudah dilakukan bisa saja dilakukan pembangunan, dikhawatirkan ada perubahan desain disaat pembangunan, yang mempengaruhi pembangunan teknis terkait pipa.					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<p>PUPR Kab. Kepulauan Natuna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada 2022 sudah dibangun Embung Sebayar sudah selesai, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. - SPAM Sebayar pembangunan baru, dari pipa, jaringan sampai ke jalinagn ke rumah. - RC siap DED, lahan dan AMDAL sudah siap. - BBWS menyampaikan untuk pipa transmisi belum ada anggaran, DED sudah termasuk anggaran untuk pipa transmisi, pipa Rp 245 M sudah masuk pipa transmisi dan SR 6048 pelanggan. 	<p>Kementerian PUPR-DJCK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini sudah masuk ke sinkronisasi CK - Pelaksanaan IPA sudah masuk baseline 2025. - Catatan: alokasi kebutuhan pendanaan Rp 247 M dibutuhkan pemecahan pendanaan, jika dilakukan pelimpahan CK, pipa dilakukan DJCK melalui BPPW Kepulauan Riau sembari menunggu transmisi (dilakukan parallel) di tahun 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah bisa transmisi bisa diklakukan secara parallel? 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
8	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di PP.	1600		m ²	Kab. Bintan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditolak karena masih merupakan kewenangan daerah dan dapat diusulkan	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Batu Duyung, Bintan	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	melalui skema DAK.	
	Catatan dan Tanggapan					
	Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
	<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hibah lahan sudah dihibahkan Bupati Bintan di provinsi. - Apabila disepakati maka lahan akan diserahkan, hanya tinggal proses BA ST. - Aset sudah diserahkan ke Provinsi tapi belum tandatangan, clean n clear sudah dilakukan, tinggal ditandatangani di Provinsi dan Kementerian Kelautan Perikanan. <p>Dinas KP Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah ke kementerian KP dalam menyampaikan usulan - Hibah sudah proses dan akan disurati untuk proses hibah ke kementerian KP - Pulau Bintan belum ada pelabuhan sama sekali mohon bantuan - Dicrosscheck kembali 	<p>Kementerian KP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lahan milik provinsi dan belum diserahkan ke KKP merupakan kewenangan daerah. - Diusulkan melalui DAK Fisik. 	<p>Dit. Kelautan dan Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Rencana Induk PP 132/2023 atas perubahan Permen KP status calon pelabuhan merupakan kewenangan daerah - Bisa diakomodir dari DAK dan merupakan kewenangan daerah - Kewenanagan Clean n Clear dari pemerindah daerah ke pusat nanti KKP akan memprioritas melalui RM. Saat ini ada 686 lokasi usulan, dengan kondisi eksisiting melihat skema ideal untuk pendanaan terkat lokasi untuk pendanaan dari masing-masing pelabuhan. 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		- Wilayah lain bisa ditempuh darat tp di di Bintang bentuknya kepulauan, misal DAK mohon dukungan kembali agar menunya tetap ada						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
9	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di PP. Pering, Natuna	1		unit	Kab. Natuna	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditolak dengan catatan dapat diusulkan melalui forum DAK karena merupakan asset provinsi.	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RC sudah dilengkapi, DED dan RAB, kesiapan pembangunan di natuna. - Latar belakan transformasi ekonomi yang diarahkan di natuna membutuhkan pangkalan pendaran ikan dnegna meningkatkan status pangkalan pendaratan ikan. - Transformasi Ekonomi yang diarahkan ke Natuna dan Anambas - Pelabuhan perikanan sudah ada sebelumnya, yang diminta rehabilitasi kawasan seluas 250 m, jaringan dan instalasi dan pembangunan pabrik es - Aset kab Natuna menyerahkan ke provinsi. 	<p>Kementerian PUPR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<p>Dit. KP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status pelabuhan perikanan yang pada tahun 2039-2045 meningkat kapasitas menjadi pelabuhan perikanan. - Kondisi eksisting kewenangan pemerintah daerah sehingga diusulkan melalui DAK fisik yang kebijakannya menunggu kebijakan DAK tahun 2024. 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
10	Dukungan sarana monitoring biofisik target konservasi	1		Paket	Kab. Bintan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditolak dengan catatan merupakan kewenangan daerah agar dapat diusulkan pada skema DAK	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASW AS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	dan berkoordinasi dengan KKP terkait RC yang harus disiapkan.
Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
		<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang sudah meresmikan kantor konservasi, perlu peningkatan Kawasan konservasi perlu dukungan sarpras - Sarana yang dibutuhkan kompresor, drone, computer - RC terkait RAB dan TOR monitoring alat selam <p>Dinas KP – Provinsi Kepulauan Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menukung Kawasan konservasi yang ditetapkan 10%, dan sudah merencanakan 1juta ha untuk konservasi - mohon dukungan agar konservasi bisa terjaga dan terkelola dengan baik dan memberikan efek ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya - Perlu kapal konservasi untuk monitoring di kawasan sekitar (5-10 GT, 13 -16 meter) 	<p>Kementerian KP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan sudah masuk pembahasan sebelumnya, diarahkan untuk diusulkan melalui DAK karena merupakan KKD. - Tahun 2023 sudah ada alokasi 395 jt dan 1,07 M di Kawasan Bintan - Jika ada pendaan diusulkan untuk speedboat. - Akan ada submenu baru untuk kawasan konservasi secara berkelanjutan pada skema DAK. - Seluruh RO dapat dimasukkan pada 1 paket. 	<p>Dit. KP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfirmasi apakah lokasi sudah ditetapkan melalui kemen KP berupa KKN (kawasan konservasi nasional) atau KKD (kawasan konservasi daerah)? KKD bisa dialokasikan ke DAK ada paket monitoring biosifik, adanya speedboat pengawas. 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	Pengembangan Kawasan Pertanian	30		ha	Kab. Natuna	Kementerian Pertanian	<p style="text-align: center;">Diakomodir dengan catatan RO terkait dengan sarana prasarana dan RC disampaikan ke Kementerian Pertanian.</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Sarana Pengembangan Kawasan		Kawasan Aneka Cabai			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : - Dipulau natuna Gunung Putri. - Petani masih individu annati akan dikembangkan untuk kelompok. - Komoditas Cabe yang akan dikembangkan (komoditas penyumbang inflasi). - Lahan sudah tersedia. Dinas Pertanian Provinsi: - Yang dimintakan adalah paket lengkap: pembukaan lahan		Kementerian Pertanian : - Ada kawasan cabai yang disampaikan Karimun, Bintan, Dan Lingga. - Ada usulan untuk pembahasan pengembangan pertanian - Melihat data dukung merupakan komoditas cabai, benih yang difasilitasi, untuk paket lengkap seperti sarprasnya, - Boleh memilih salah satu baik sarpras atau perbenihannya saja		Dit. PP : - RO kurang spesifik, belum terlihat jelas paket atau bukan, data dukung belum tersedia - Ketika dicek masih belum jelas dapat dijelaskan pengembangan seperti apa dan untuk komoditas apa. - Geotagging belum jelas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		(pembersihan), pengairan(selang), pupuk, bibit dan obat-obatan. - Lahan dan kolompok tani sudah tersedia. - Merupakan lokasi transmigrasi lebih dari 15 tahun. - RO final yang dipilih adalah sarana dan prasarana.	- Sudah kesepakatan 3 kabupaten 20 ha. - Bisa menambah Natuna namun volume menyesuaikan kemampuan kami - Sarpras saprodi biasanya untuk alat-alatnya saja dan bukan benih. - Mohon disampaikan RC kepada kami.						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	Pengembangan Pelabuhan Teluk Durian Anambas	1		paket	Kab. Kepulauan Anambas	Kementerian Perhubungan	Ditolak dengan catatan perlu berkoordinasi dengan Kemenhub agar pelabuhan dapat ditingkatkan statusnya ke pelabuhan regional dan masuk pada RIPN.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Lau		Pelayanan Publik Lainnya			Layanan Angkutan Rede Prioritas Nasional	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran wilayah hub perdagangan regional, melayani banyak kapal termasuk kargo dan bongkar muat - Masalahnya memastikan pada RIPN - Milik Provinsi dan sudah ada sebelumnya - Sudah diusulkan 2023 tapi belum diputuskan oleh Kementerian Perhubungan <p>Dinas Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Milik provinsi, sudah ada perlu dibangun - Sudah diusulkan pada Aripn 2023 sudah masuk ke usulan bahkan sudah masuk pada draft - Kewenangan provinsi, status pelabuhan penguasaan regional - Saat ini asset milik provinsi - Diusulkan tahun 2023 untuk pengumpulan regional 	<p>Kementerian Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait lokasi Kab Karimun, status pelabuhan lokal yang diajukan sesuai asset dari tingkat 2 kabupaten/kota - Status perubahan untuk masuk ke PR supaya bisa diusulkan ke menjadi asset provinsi - Syarat terkait perairannya, bukan hanya status yang ditingkatkan, tp masuk pada perairan regional - Bisa dilakukan melalui UPT terdekat - Perlu adanya bukti pelayanan dari pelabuhan yang dilayani sudah melayani pelabuhan mana saja di Provinsi Kepri. 	<p>Dit. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPN harus diterbitkan DITJEN Perhubungan Laut. - Indikasi pelabuhan baru belum masuk untuk ketiganya. - Perlu penanganan lebih lanjut, untuk diusulkan DAK. - Belum masuk ke RIPN sehingga tidak bisa diusulkan pada DAK. - Masih menunggu status RIPN nya. 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
13	Lanjutan pengembangan	1		Paket	Kab. Natuna	Kementerian Perhubungan	Ditolak dengan catatan perlu berkoordinasi
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pelabuhan Parit Rempak	02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		dengan Kemenhub agar pelabuhan dapat ditingkatkan statusnya ke pelabuhan regional dan masuk pada RIPN.	
	Program		Kegiatan		KRO			RO
	Program Infrastruktur Konektivitas		Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut		Prasarana Bidang Konektivitas Laut			Fasilitas Pendukung Prioritas Nasional
	Catatan dan Tanggapan							
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas		
	<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran wilayah hub perdagangan regional, melayani banyak kapal termasuk kargo dan bongkar muat - Masalahnya memastikan pada RIPN - Milik Provinsi dan sudah ada sebelumnya - Sudah diusulkan 2023 tapi belum diputuskan oleh Kementerian Perhubungan <p>Dinas Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Milik provinsi, sudah ada perlu dibangun - Sudah diusulkan pada Aripn 2023 sudah masuk ke usulan bahkan sudah masuk pada draft - Kewenangan provinsi, status pelabuhan penguin regional 		<p>Kementerian Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait lokasi Kab Karimun, status pelabuhan lokal yang diajukan sesuai asset dari tingkat 2 kabupaten/kota - Status perubahan untuk masuk ke PR supaya bisa diusulkan ke menjadi asset provinsi - Syarat terkait perairannya, bukan hanya status yang ditingkatkan, tp masuk pada perairan regional - Bisa dilakukan melalui UPT terdekat - Perlu adanya bukti pelayanan dari pelabuhan yang dilayani sudah melayani pelabuhan mana saja di Provinsi Kepri. 			<p>Dit. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPN harus diterbitkan DITJEN Perhubungan Laut. - Indikasi pelabuhan baru belum masuk untuk ketiganya. - Perlu penanganan lebih lanjut, untuk diusulkan DAK. - Belum masuk ke RIPN sehingga tidak bisa diusulkan pada DAK. - Masih menunggu status RIPN nya. - 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini asset milik provinsi - Diusulkan tahun 2023 untuk pengumpulan regional 							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	Pengembangan/ Rehabilitasi Pelabuhan Kota Segara Tanjung Uban	1		Paket	Kab. Bintan	Kementerian Perhubungan	Ditolak dengan catatan perlu berkoordinasi dengan Kemenhub agar pelabuhan dapat ditingkatkan statusnya ke pelabuhan regional dan masuk pada RIPN.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	Prasarana Bidang Konektivitas Laut		Fasilitas Pendukung Prioritas Nasional			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran wilayah hub perdagangan regional, melayani banyak kapal termasuk kargo dan bongkar muat - Masalahnya memastikan pada RIPN - Milik Provinsi dan sudah ada sebelumnya 		Kementerian Perhubungan: <ul style="list-style-type: none"> - Terkait lokasi Kab Karimun, status pelabuhan lokal yang diajukan sesuai asset dari tingkat 2 kabupaten/kota - Status perubahan untuk masuk ke PR supaya bisa diusulkan ke menjadi asset provinsi 		Dit. Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> - RIPN harus diterbitkan DITJEN Perhubungan Laut. - Indikasi pelabuhan baru belum masuk untuk ketiganya. - Perlu penanganan lebih lanjut, untuk diusulkan DAK. 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diusulkan 2023 tapi belum diputuskan oleh Kementerian Perhubungan <p>Dinas Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Milik provinsi, sudah ada perlu dibangun - Sudah diusulkan pada Aripn 2023 sudah masuk ke usulan bahkan sudah masuk pada draft - Kewenangan provinsi, status pelabuhan penguasaan regional - Saat ini asset milik provinsi - Diusulkan tahun 2023 untuk pengumpulan regional 	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat terkait perairannya, bukan hanya status yang ditingkatkan, tp masuk pada perairan regional - Bisa dilakukan melalui UPT terdekat - Perlu adanya bukti pelayanan dari pelabuhan yang dilayani sudah melayani pelabuhan mana saja di Provinsi Kepri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum masuk ke RIPN sehingga tidak bisa diusulkan pada DAK. - Masih menunggu status RIPN nya. 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
15	Koordinasi Penegasan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	6		Unit	Kab. Bintan, Kab. Kepulauan Anambas, Kota Batam	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Diakomodir dengan catatan perbaikan RO: Koordinasi Pengelolaan Pilar Batas Negara Wilayah Laut dan Udara dan difokuskan
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 Transformasi Ekonomi		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
		Program	Kegiatan	KRO	RO		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas Negara	Koordinasi	Koordinasi Pembangunan Pos Pengamanan dan Sarana Prasarana Pendukung di PPKT penanganan Khusus	pada 2 titik prioritas (Pulau Berakit dan Pulau Malang Berdaun).
Catatan dan Tanggapan						
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada titik dasar tanda batas namun diperlukan beberapa pemeliharaan dan pengadaan tanda batas. Dikhawatirkan pada hilangnya tanda batas negara. - Ada 6 titik di Kab Bintan <p>Perbatasan Kepulauan Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prioritas Pulau Batik, titiknya sudah hilang, 2023 dibangun <i>water break</i> oleh BBWS, sehingga base pamflet nya hilang. - Kemudian dilakukan penimbunan sehingga titik hilang. - Harus segera dibangun - Idelanya harus ada tugu batas yang muncul setengah meter hingga satu meter. - Koordinasi dengan Pushidrosal. 		<p>BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dilakukan pemda dengan koordinasi BNPP dan Pushidrosal. - Perlu dikonfirmasi terkait lokasi, tidak semua wilayah mendapatkan lokasi. 		<p>Dit. Regional 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BNPP melakukan penandaan batas negara. - RO seharusnya kordinasi pemeliharaan dan pembangunan batas negara harus disesuaikan. - Bisa dilakukan BNPP, pendanaan terkadang bisa dilakukan dengan join, agak membingungkan untuk koordinasi di tingkat pusat. - Lokasi berdasarkan pembahasan bilateral meeting, jika urgensi dilakukan pada lokasi. - 2 titik urgensi BNPP, menjadi bahan fasilitasi. 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum mengetahui siapa yang akan membangun, dalam koordinasi seharusnya ditangani BNPP. <p>Kepala Dinas Perbatasan Kepulauan Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan prioritas, penegasan tanda batas wilayah, tandanya hilang Pulau Brakit, akan bermasalah di titik dan sudah ditangan BNPP. - Pusat yang akan membangun - Dari 6 pulau harus segera dibangun prioritas 2 Pulau Brakit dan Pulau Malau. - Sosialisasi penjagaan batas negara terhadap masyarakat diperbatasan. - Dari 7 kab/kot ada 5 yang yang perbatasan dengan negara lain. - 2 titik lokasi yang urgent. <p>BPPN Kepulauan Riau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat 					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
16	Sosialisasi Stunting dan Penjagaan Batas	5		Kegiatan	Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Natuna, Kab.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Diakomodir dengan 2 lokasi prioritas (Pulau

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Wilyah Negara Pada Masyarakat PPKT				Kepulauan Anambas, Kota Batam		Malang Berdaun dan Pulau Brakit).	
	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
	01 Transformasi Sosial		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		03 Perlindungan Sosial yang Adaptif		
	Program	Kegiatan	KRO		RO		
	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Pelaksanaan pelatihan penanggulangan stunting dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan		
	Catatan dan Tanggapan						
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
	Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : -		BNPP : - Pasal 19 Sosialisasi bisa dilakukan oleh BNPP, BIG. - Pasal 20 Sosialisasi dilakukan Pemda. - Sosialisasi tahun depan tidak dianggarkan. - Menyangkut 4 verifikasi pemetaan, pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan terkait pemda no 4 pemeliharaan, pasal 15 - Soailisasi belum diadakan		Dit. Regional II : - Terkait sosialisasi diadakan RO baru di 2025 ada beberapa nelayan yang belum memahami adanya batas wilayah yang harus diperhatikan. - RO: Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut. - Lokasi yang di RENJA di Kepulauan Riau: Bintang pesisir, Natuna dan Karimun		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

			- Kegiatannya gerakann peduli, bukan spesifikasi terkait.			- Di rancangan RENJA sudah dibahas di bilateral ada pemberdayaan masyarakat pesisir.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
17	Pembangunan Jembatan Semala Kabupaten Natuna	1		Unit		Kementerian PUPR	Ditolak dengan catatan agar diusulkan melalui forum DAK, Dit Transpport menjaga menu DAK dan Kepulauan Riau dapat diprioritaskan.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau : - Akses utama yang menghubungkan Natuna memberikan pertumbuhan - FS DED, Doklinjur, lahan sudah clear, RAB sudah ada. - Jembatan dalam kondisi rusak merupakan asset provinsi.		Kementerian PUPR-DJ Bina Marga : - Sudah diusulkan ke IJD, tapi di Natuna diprioritaskan di 2 jembatan lain yang terdampak longsor. - Status jalan provinsi, sehingga bisa diusulkan di DAK.		Dit. Transportasi : - Menghubungkan jalan nasional - Jembatan kayu eksisting kondisi rusak. - Gubernur menyampaikan surat diusulkan di IJD dan Bappenas untuk masuk skala prioritas.					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		- Bentang jalan 30 m Panjang, dan 5 m lebar.			- Beberapa kegiatan yang merupakan bencana longsor, prioritas jembatan natuna karena dampak longsor, bukan skala IJD 2024. - Status jalan provinsi bisa diusulkan di DAK, IJD diusulkan tapi belum masuk.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	Pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang	1		Unit		Kementerian PUPR	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Provinsi Kepulauan Riau: - Berprogres, sudah disampaikan kementerian melalui gubernur. - Opsi terlalu mahal usulan, sudah di proses tagging.		Kementerian PUPR-DJCK : - Jika RC sudah memenuhi kami siap mengakomodir		Dit. Perkim : - Cukup Panjang, usulan gubernur sudah masuk dan sudah ditanggapi terkait usulan.			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi prioritas harapannya, menjadi milik Indonesia - Terdapat 9 lantai menjadi tugu monumental yang bisa melihat Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat. - FS, Masterplan, DED, lahan sudah siap - Yang diusulkan 89,9 M, keinginan pak gubernur karena milik Indonesia <p>DINAS PUPR Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Update terakhir gubernur sudah bertemu IRJEN CK sudah menanggarkan untuk DED dari DJCK mengacu MP dari Prov Kepulauan Riau - Berkordinasi dengan PUPR Kepulauan Riau dan tahun 2024 sudah positif dilakukan DED - Kebutuhan 2 ha saat ini sudah mengidentifikasi dan menyiapkan sertifikat terkait lahan yang dimaksud (sedang berproses). - Identifikasi lahan sudah dilakukan, pengusulan sertifikat di BPS masih perlu waktu. - Status lahan tanah kosong, tidak berdampak ke masyarakat. 		<ul style="list-style-type: none"> - Catatan: monument tugu Bahasa kami mencoba mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan terkait, untuk promosi wisata budaya memang ada <i>community-based tourism</i> sehingga cukup kami dulu - Dengan catatan usulan gubernur 25,5 M dengan anggaran di FS 89,9 M masih berbeda dengan anggaran beda msih signifikan - Usulan ini tidak cukup berkontribusi namun dalam pembahasan TM pagu Indikatif, untuk TA 2025 sudah masuk <i>longlist</i> BBPW DJCK untuk pembangunan yang memiliki potensi untuk diakomodir di PUPR. 	
--	--	--	--	---	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian lahan milih pemprov, sudah dilakukan pembebasan lahan di tahun sebelumnya. - Surat Gubernur sesuai 89,9 M, surat 25 M merupakan sharing pemda, karena anggaran cukup besar maka pemda bersedia 25 M dengan sisanya itu merupakan anggaran dari APBN. 							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
19	Rehabilitasi Balai Adat Pulau Penyengat	1		Paket		Kementerian PUPR	Diakomodir dengan catatan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latbel: Pulau Penyengat objek wisata multifungsi, religi, heritage, <i>zero carbon</i> dan yang sedang berproses Kawasan Wisata Menulis - Bangunan tahun 1985 dengan penurunan beberapa fungsi, perlu revitalisasi Gedung utama dan Gedung lain. - DED FS, UKP, UPL sudah ada, luas 4478 m2 - Harapan bisa menjadi ikon kunjungan wisata Pulau Penyengat, terintegrasi dengan balai adat - Ada perbaikan <i>hardscape</i> dan <i>soft scape</i> ada kerjasama dengan kejaksaan untuk mengangkat isu kearifan local - Merupakan asset Pemko Tanjung Pinang - Sudah <i>tersounding</i> pada KONREG PUPR dengan kesimpulan diterima, 2 usulan yang diterima rehabilitasi rumah adat dan jalan lingkar 	<p>Kementerian PUPR-BPIW :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KONREG yang didiskusikan tugu Bahasa. Sedang didiskusikan dengan dit PKP. - Masih menunggu kepastian, perlu didukung dengan RC karena dilihat secara keseluruhan. <p>Kementerian PUPR-DJCK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilihat kegiatan belum, RC sudah tersedia maka bisa diakomodir sesuai anggaran yang tersedia. 	<p>Dit. Perkim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pembahasan rinci dan signifikan. - Belum berkontribusi langsung pada akses rumah tangga. - Belum ada longlist DJCK PUPR - Belum merekomendasikan balai adat. - List KONREG: yang masuk monument tugu Bahasa. 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
20	Lanjutan Pembangunan	1		Paket		Kementerian PUPR	Ditolak, akan diusulkan

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan Lingkar pulau Penyengat	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		kembali di Tahun 2026 atau melalui skema DAK Agar dilakukan koordinasi kembali dengan DJCK PUPR.	
	02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
	Program	Kegiatan	KRO		RO			
	Catatan dan Tanggapan							
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
	<p>Bappeda Provinsi Kepulauan Riau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah dibahas dalam KONREG PUPR. - RC sudah tersedia karena merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2023 dan 2024. - Ruas jalan ditambah termasuk jalan menuju Tugu Bahasa, sesuai <i>geotagging</i> 6 ruas jalan diluar yang kita bangun sebelumnya. - Pembangunan 2023 dan 2024 dari BPPW. - Ketiga kegiatan sudah disepakati 		<p>Kementerian PUPR :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Awalnya merupakan kumuh namun DJCK perlu konfirmasi. <p>Kementerian PUPR-DJCK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengakomodir, setelah ini akan dihubungi ke balai Kepulauan Riau. - Pendanaan masih belum dapat dipastikan apabila dapat dibangun di 2025. 		<p>Dit. Perkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data Pagu Indikatif, belum masuk sehingga belum bisa dimasukkan dalam pagu 2025. - Difokuskan ke Tugu Bahasa. - Dilihat kembali apakah ada menu pada DAK. 			

3. REKAPITULASI

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	11
Ditolak	13
Tidak Terbahas	0